

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Normalisasi Kali Sunter Dilanjutkan

60 Bidang Tanah akan Dibebaskan

MAKASAR (Pos Kota) - Proyek normalisasi Kali Sunter yang sempat terhenti sejak tahun 2014 lalu, akan dilanjutkan. Sebanyak 60 bidang tanah di kawasan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, segera dibebaskan.

Lurah Cipinang Melayu, Agus Suleman mengatakan, Pemprov DKI akan membebaskan tanah untuk normalisasi Kali Sunter. Pekan lalu telah digelar pertemuan dengan warga RW 04 untuk membahas ganti rugi atas tanahnya yang terkena normalisasi. "Sebelumnya - pen-

gukuran bidang lahan di RW 03 juga sudah dilakukan," katanya, Rabu (12/8).

Dikatakan Agus, di RW 03 terdapat 60 bidang lahan yang terkena dampak atas pelebaran Kali Sunter untuk mengatasi banjir dan telah diukur. "Badan pertahanan nasional (BPN) sendiri yang langsung mengukur 60 bidang lahan yang terdampak," ujarnya.

Tahap selanjutnya, kata Agus, pertemuan antara Dinas Sumber Daya Air DKI dengan warga untuk membahas ganti rugi. Sejak awal proyek Pemprov DKI sepakat

menanggung biaya pembebasan lahan, sementara eksekusi oleh pemerintah pusat. "Nah pembicaraan ganti rugi itu sendiri dilakukan dengan warga di RW 04," tuturnya.

Agus optimis proyek normalisasi Kali Sunter tak bakal terkendala masalah ganti rugi. Terlebih, warga juga sejak lama menginginkan normalisasi setelah beberapa waktu lalu menjadi langganan banjir. "Sebagian besar warga sudah setuju dengan rencana ini, sehingga proyek normalisasi bisa berjalan dengan

baik," ungkapnya.

Agus mencontohkan, kesepakatan warga RW 04 yang langsung setuju saat Pemprov DKI menyodorkan nominal Rp5 juta - Rp 6 juta per meternya. Bahkan, ketika Gubernur DKI Anies Baswedan ke bantaran kali Sunter, beberapa warga juga sudah menagih kapan normalisasi dilanjutkan. "Jadi waktu bertemu dengan pak Gubernur, warga terus menanyakan kapan normalisasi dilanjutkan, bukan berapa ganti rugi untuk rumah yang terdampak proyek," ungkapnya. (Ifand/ta)